

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset tetap merupakan bagian penting dari kekayaan daerah yang mencakup tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaannya yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengelolaan yang baik terhadap aset tetap tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya tetapi juga memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan daerah kepada masyarakat. Aset tetap merupakan salah satu komponen dalam neraca, selain aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, serta aset lainnya. Peran aset tetap sangat berpengaruh karena biasanya memiliki nilai yang besar jika dibandingkan dengan elemen-elemen neraca yang lain **(Halim dan Kusufi, 2014:307)**.

Pengelolaan aset tetap merupakan komponen yang sangat penting dalam operasi pemerintahan daerah. Kekayaan yang bernilai tinggi seperti gedung dan bangunan, tanah, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaannya merupakan contoh aset tetap pada pemerintah daerah. Pengelolaan aset tetap bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Pengelolaan aset yang efektif juga membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran, menjaga kondisi aset agar tetap layak digunakan, dan mencegah pemborosan sumber daya.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tentang Aset Tetap, aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan dimana pemerintah dan masyarakat diharapkan untuk memperoleh

keuntungan ekonomi dan sosial di masa depan. Aset ini dapat diukur dalam satuan uang dan termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik dan sumber daya yang dipegang oleh pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 mengatur pengelolaan aset tetap pemerintah daerah. Peraturan ini menetapkan standar teknis untuk pengelolaan barang milik daerah untuk memastikan bahwa aset dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan yang baik harus mencakup unsur-unsur administratif dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aset.

Pengelolaan aset tetap di pemerintahan daerah seringkali menjadi bagian yang paling penting dari anggaran, dan memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan data yang diperoleh pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan ditemukan beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan aset tetap seperti masih adanya aset tetap yang belum tercatat secara akurat dan belum lengkap dalam sistem pencatatan. Hal ini terjadi karena ketidaksesuaian antara data fisik di lapangan dengan data administrasi yang dimiliki oleh instansi, belum adanya penilai pada pengelolaan aset tetap yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan serta pemanfaatan sistem informasi aset yang belum optimal. Meskipun Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki aplikasi pencatatan barang milik daerah, namun masih terdapat unit kerja yang belum memanfaatkannya secara maksimal, sehingga masih menggunakan metode manual dalam pencatatan. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko terjadinya kesalahan dalam pencatatan aset, duplikasi data, serta keterlambatan dalam pelaporan aset. Pada saat sekarang ini, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) juga mulai dihadapkan menggunakan teknologi informasi untuk lebih efisien dan transparan dalam pencatatan dan pemanfaatan aset agar lebih efisien dan transparan.

Pengelolaan aset tetap bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang dapat diandalkan, aset tetap harus dikelola dengan baik. Pengelolaan aset tetap daerah adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah dalam pengelolaan aset. Ini harus dilakukan dengan baik karena aset ini dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kemampuannya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya pembahasan yang diharapkan penulis mendapatkan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis,

1. Menambah pemahaman, wawasan penulis terkait dengan pengelolaan aset tetap.
2. Memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai bagaimana Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan dengan baik sesuai aturannya.
3. Mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa studi, sehingga penulis dapat merasakan manfaat dari proses pembelajaran.

4. Penelitian ini juga dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan program sarjana (S1) pada program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas.

b. Bagi Instansi Pemerintah (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan).

1. Diharapkan menjadi pertimbangan dan masukan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan guna untuk meningkatkan kinerja pegawai di masa yang akan datang.

2. Sebagai bahan perbandingan dan penerapan pengetahuan mengenai Pengelolaan Aset Tetap yang diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Bagi Fakultas

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dalam bidang ilmunya.

2. Dapat menjalin hubungan yang harmonis dan kerjasama dengan instansi atau perusahaan, sehingga dapat menerima mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk terus penelitian di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari lima bab adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah mengenai penelitian yang dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisannya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori tentang penelitian dan penelitian terdahulu yang mendukungnya serta kerangka berfikir dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis data, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dan pembahasan Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

